

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mendewasakan, berkarakter, mengerti dan memahami serta melestarikan budaya mereka, mengerti baik atau buruknya sesuatu, dan sebagainya. Pendidikan di Indonesia dimulai dengan zaman berkembangnya agama-agama dunia di wilayah nusantara yaitu sebelum tahun 1600 pada zaman Hindu dan Islam. Pada masa itu pelajaran yang diberikan merupakan pelajaran-pelajaran keagamaan semata, yang diutamakan adalah tujuan akhirat atau kehidupan manusia setelah di dunia ini. Guru atau pengajar merupakan masyarakat setempat. Hubungan antara guru dan murid sangat erat dan mendalam, bahkan hubungan tersebut ada yang berlanjut hingga turun-temurun.¹

Pada era modern ini, pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terjadi berkat semakin tak terbendungnya arus globalisasi. Globalisasi tidak bisa dicegah, akan tetapi harus dihadapi dengan beradaptasi dengan peradaban dan kebiasaan-kebiasaan baru yang datang di negara ini. Sangat diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut yaitu salah satunya dengan tetap mengikuti tradisi atau kebiasaan saat ini tanpa menghilangkan nilai dan norma di daerah masing-masing individu. Penyelenggaraan sistem pendidikan saat ini terdapat fenomena dikotomi

¹ Syafruddin Nurdin, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 19-20.

pendidikan. Dapat dilihat saat ini adanya fokus pembelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan formal yaitu pembelajaran yang berfokus pada pengetahuan umum (Biologi, Fisika, Kimia, Geografi Matematika dan sebagainya) di SD, SMP, SMA Universitas Umum dan sebagainya, kemudian pembelajaran yang berfokus pada pengetahuan keagamaan di MI, MTs, MA dan sebagainya.

Pendidikan di Indonesia masih sangat menekankan pada kecerdasan otak, hanya beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kecerdasan otak tersebut, akan tetapi juga menekankan pada pengetahuan-pengetahuan spiritual, kecerdasan emosional, kreativitas dan ketahanan mental dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung hanya berfokus pada pengetahuan-pengetahuan yang kurang luas hingga munculnya fenomena penolakan pluralitas. Padahal di negara yang penuh dengan kemajemukan ini, sangat diperlukan adanya kesadaran pluralitas serta toleransi antar sesama masyarakat dan hal tersebut cenderung terletak pada kecerdasan emosional serta ketahanan mental pada individu. Menurut Dr. K.H. Said Aqil Siroj, kecerdasan otak atau berpikir (IQ), kecerdasan dalam pengendalian emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) merupakan komponen yang perlu dikembangkan sehingga dapat menghasilkan daya guna yang luar biasa, baik secara horizontal maupun vertikal.²

Saat ini sedang ramai dibicarakan tentang munculnya dikotomi ilmu pengetahuan. Dikotomi ilmu pengetahuan adalah adanya pemisahan atau

² Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), 240.

pertentangan dalam ilmu pengetahuan. Masyarakat beranggapan bahwa ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua bagian yaitu ilmu umum dan ilmu agama. Lebih ironis lagi, sebagian masyarakat mengatakan dan percaya bahwa ilmu agama bukan termasuk dalam keilmuan atau sesuatu yang lepas dari wacana keilmiah. Hal ini kemudian menimbulkan pemisahan atau pembagian antara pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Tuhan dan pengetahuan yang merupakan hasil dari pemikiran manusia (*scientific knowledge*). Pemisahan ini terjadi disebabkan oleh sumber ilmu, fokus ilmu, serta dasar keilmuan yang berbeda. Dikotomis keilmuan ini merupakan salah satu penyakit di bidang pendidikan yang dapat menyebabkan kemunduran umat Islam. Ajaran al-Qur'an yang berisi banyak pengetahuan serta pesan-pesan moral didalamnya, hanya dipahami dan dikaji secara parsial. Alhasil, sistem pendidikan Islam yang berlangsung selama ini mengalami keterasingan dan keterpurukan serta terkesan sebagai kelas bawah (*under class*) dibandingkan dengan sistem-sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan umum.³ Sedangkan dampak terhadap lembaga pendidikan umum yang menekankan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat empiris (berdasarkan pengalaman, penemuan atau penelitian yang telah dilakukan) sangat rapuh pada pengetahuan keagamaan.⁴

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa dikotomi keilmuan merupakan salah satu penyakit di bidang pendidikan. Paham dikotomi keilmuan yang

³ Ahmad Barizi, *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi & Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 20-21.

⁴ Samrin, "Dikotomi Ilmu dan Dualisme Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib*, 1 (Januari-Juni, 2013), Vol. 6, 190.

berkembang di masyarakat saat ini, menimbulkan adanya pemisahan antar ilmu pengetahuan sehingga memunculkan persepsi adanya prioritas yang berbeda antar disiplin keilmuan. Hal ini mengakibatkan mayoritas masyarakat akan lebih memprioritaskan sebagian ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu hasil pemisahan antar ilmu pengetahuan yang akan diperoleh oleh anak-anaknya, contohnya kebanyakan orang tua berpikir lebih baik menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah formal yang memiliki fokus pada keilmuan umum saja karena keilmuan umum tersebut akan berguna sebagai penunjang dalam memperoleh pekerjaan atau memiliki persepsi bahwa ilmu keagamaan hanya sebagai pelengkap dalam ilmu pengetahuan, kemudian lebih parahnya lagi ada yang berpendapat bahwa ilmu keagamaan bukan termasuk disiplin keilmuan melainkan sebagai spiritualitas belaka pada individu. Hal ini kemudian akan berimbas pada masyarakat sendiri, yakni dapat mempersempit wawasan keilmuan yang diperoleh maupun yang dikaji oleh masyarakat tersebut. Padahal pada hakikatnya kedua ilmu pengetahuan tersebut (ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan keagamaan) memiliki keterhubungan antar satu sama yang lain serta memiliki urgensi masing-masing bagi setiap individu.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama

mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.⁵

Allah mengisyaratkan dalam ayat tersebut tentang kewajiban memperdalam ilmu agama. Sedangkan lafadz “*tha’ifah*” mengisyaratkan bahwa Allah SWT tidak menghendaki semua manusia terjun dalam menekuni ilmu agama, tetapi Allah SWT menghendaki hanya sebagian kecil yang terjun dalam menekuni ilmu agama.⁶ Hal ini bisa dipahami bahwa Allah SWT tidak ingin membebani manusia dengan pembebanan yang berat dengan ilmu-ilmu agama. Akan tetapi sebagian orang yang telah menekuni ilmu agama tersebut hendaknya mengajarkan kepada orang lain berdasarkan kadar yang dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka. Dalam hal ini yang sangat perlu diberikan kepada mereka adalah pengetahuan hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang beriman. Sehingga mereka dapat “menjaga dirinya” dengan ilmu-ilmu hukum yang telah diajarkan tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang pintar dalam hal duniawi, tetapi lalai dalam hal ukhrawi. Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 7:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

Artinya: “Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai”.⁷

Mempelajari ilmu agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi orang muslim. Ilmu agama tersebut dapat dijadikan pedoman sehingga

⁵ QS. at-Taubah (9): 122.

⁶ Program Pascasarjana Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. “Integrasi Keilmuan dalam Al-Qur’an”. (<https://pasca.iai-tribakti.ac.id/>, Diakses pada 3 Juni 2021).

⁷ QS. ar-Rum (30): 7.

dapat menjaga diri agar tetap dalam koridor yang diisyaratkan dalam Islam. Hal tersebut tidak berarti bahwa yang perlu dipelajari hanya ilmu agama akan tetapi ilmu sains atau pengetahuan alam (ilmu umum) pun perlu dipelajari, sehingga seorang muslim akan mengetahui tanda-tanda ke-Esa-an Allah dari hal-hal yang berada di langit dan bumi yang dapat menguatkan keimanan mereka. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (ke-Esa-an Allah) bagi kaum yang memikirkannya”.⁸

Allah SWT menyebutkan dalam ayat tersebut hal-hal yang berkaitan dengan dunia (duniawi). Salah satunya yaitu “silih bergantinya malam dan siang” yang telah diketahui dalam ilmu pengetahuan alam (sains) saat ini, bahwa adanya siang dan malam merupakan sebab adanya rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kuasa Allah dengan mengetahui dan mempelajari hal duniawi (ilmu umum), seorang muslim akan ditunjukkan tanda-tanda ke-Esa-an Allah didalamnya sehingga akan meningkatkan keimanan mereka.

⁸ QS. al-Baqarah (2): 164.

Ayat-ayat al-Qur'an diatas merupakan beberapa ayat al-Qur'an yang digunakan oleh pemikir Muslim sebagai pedoman dalam mendukung upaya menumbuhkan pandangan dan sikap positif terhadap kedua jenis keilmuan (ilmu agama dan ilmu umum) yang saat ini berkembang di dunia Islam. Sehingga dapat melahirkan kesadaran bahwa keilmuan agama dan keilmuan umum merupakan hal yang harus sama-sama diprioritaskan.

Upaya dalam mencari model-model pembelajaran baru untuk mendamaikan kembali dikotomi keilmuan tetap ada dan masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Dr. H. Ahmad Barizi, M.A., bahwa untuk mengembalikan pemahaman tentang adanya dualitas (terbagi menjadi dua) dalam keilmuan tersebut menuju pada integrasi (penyatuan) dibutuhkan keberanian dari berbagai lapisan masyarakat. Adanya pengkajian ulang terhadap visi, misi serta orientasi sistem pendidikan yang ada merupakan hal yang sangat penting, jika tidak ingin terulang-ulang kembali tradisi yang tidak dapat mengatasi berbagai persoalan saat ini dan yang akan datang sehingga terkesan tidak efektif. Pokok persoalan yang mendasar sebenarnya terletak pada tujuan untuk menanamkan pemahaman secara *kaffah* (holistik) terhadap ajaran agama yang luas dan global. Karena pada hakikatnya ilmu tidak mengenal adanya dikotomi, dualitas serta disintegrasi, melainkan dalam ilmu terdapat spesialisasi (pengkhususan atau penjurusan) yang berkembang semakin pesat, berkualitas dan kompetitif.⁹

⁹ Barizi, *Pendidikan Integratif*, 22-23.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, tidak mengabaikan nilai toleransi dalam keberagaman serta memacu peningkatan partisipasi masyarakat.

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, yang menetapkan sebagian kewenangan telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan daerah untuk melakukan berbagai kreasi serta inovasi dalam upaya pembangunan di daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan, khususnya bab 14 pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.¹⁰

Penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten atau kota, akan tetapi lebih jauh lagi yaitu sampai pada tingkat lembaga pendidikan atau sekolah. Harapan adanya pengalihan kewenangan dalam pengambilan keputusan pada tingkat sekolah adalah menumbuhkan kemandirian serta mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan keadaan dan tuntutan di lingkungan masyarakat.

Kewenangan diberikan agar setiap sekolah dapat lebih leluasa dalam mengelola sumber daya sekolah dengan mengalokasikannya sesuai dengan

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab 14, pasal 50.

prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekitar. Masyarakat dituntut berpartisipasi dalam membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Bukan hanya masyarakat yang menjadi prioritas utama, akan tetapi sekolah juga dituntut untuk memperhatikan kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian sekolah memiliki tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggara pendidikan di sekolah.¹¹

Adanya desentralisasi di bidang pendidikan pada tingkat sekolah, sekolah-sekolah mulai menetapkan kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki dan mengembangkan mutu sekolah mereka secara mandiri. Kebijakan yang ditetapkan sekolah-sekolah juga tetap mengacu pada kebijakan nasional. Kebijakan yang ditetapkan beberapa sekolah berdasar pada kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di lingkungan sekolah mereka. Hal ini memerlukan kepekaan dan kreativitas dari masing-masing sekolah dalam memahami serta memenuhi tuntutan di lingkungan masyarakat dan pemerintah.

Perlu adanya strategi dan inovasi dari pihak sekolah agar tetap dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Misalnya, saat ini masalah yang sedang dihadapi di dunia pendidikan adalah adanya dikotomi keilmuan yang telah disebutkan di atas. Dengan adanya dikotomi keilmuan tersebut mengakibatkan adanya prioritas yang berbeda di antara keilmuan umum dan keilmuan agama.

¹¹ Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5.

Sehingga memunculkan berbagai inovasi di beberapa sekolah dalam mengatasi dikotomi keilmuan tersebut. Salah satunya sekolah yang menyuguhkan pendidikan “plus”. Sekolah tersebut berupaya menjawab kebutuhan para orang tua yang menginginkan anak-anaknya mendapatkan keilmuan umum sekaligus ilmu keagamaan di sekolah. Dengan harapan anak mereka mendapatkan wawasan yang lebih luas dan salah satu upaya orang tua dalam membentengi anak mereka dengan menanamkan ilmu keagamaan.

Upaya lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu tidak terlepas dari peran pemimpin atau kepala lembaga pendidikan selaku pimpinan sekaligus pengelola lembaga. Kepala (pimpinan) lembaga pendidikan seharusnya dapat bertindak, baik sebagai seorang pimpinan maupun seorang manajer yang efektif. Pada dasarnya seorang kepala lembaga pendidikan, seharusnya dapat menerapkan model kepemimpinan yang baik agar potensi-potensi yang dimiliki lembaga tersebut dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pendukung tercapainya tujuan dari lembaga tersebut.¹²

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pimpinan lembaga pendidikan merupakan seseorang yang berperan penting dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang akan, sedang ataupun telah dilakukan di lembaga pendidikan yang dikelola. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, merupakan penunjang dalam pencapaian tujuan dari lembaga yang dikelola pimpinan tersebut. Begitu pula dengan menciptakan inovasi dan strategi dalam

¹² Febri Antoni, “Model Kepemimpinan Yayasan dalam Meningkatkan Profesionalisme Dosen di STIT Kota Pagaralam“, *An-Nizam*, 2 (Agustus, 2016), Vol. 1, 98.

pengelolaan lembaga pendidikan akan menunjang tercapainya tujuan dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini diperlukan pemimpin atau kepala lembaga pendidikan yang kreatif serta inovatif dalam menentukan kebijakan terkait pengembangan serta pengelolaan lembaga pendidikannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan pendidikan.

Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang berupaya dalam mengatasi masalah dikotomisme keilmuan. Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah. Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama ini berlokasi Jl. Imam Bonjol No. 270 di Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Salah satu upaya lembaga pendidikan Islam ini dalam mengatasi masalah dikotomisme keilmuan, yaitu dengan memberikan pendidikan “plus” pada peserta didik. Kebijakan yang ditetapkan di SDNU Gurah pun tidak lepas dari peran pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah yang menaunginya.

Berdasarkan gambaran diatas, penelitian ini menjelaskan tentang beberapa kebijakan yang diberikan kepada Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Gurah Kabupaten Kediri dalam mengaplikasikan pendidikan “plus”. Dalam penelitian ini, kebijakan yang peneliti ambil adalah kebijakan dari kepala SDNU Gurah sendiri dan kebijakan dari pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah Gurah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan di SDNU

Gurah pun tidak lepas dari campur tangan pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah selaku lembaga yang menaunginya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sebagai upaya untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan masalah kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan pendidikan plus di SDNU Gurah?
2. Bagaimana proses menentukan prediksi kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan pendidikan plus di SDNU Gurah?
3. Bagaimana proses menentukan rekomendasi kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan pendidikan plus di SDNU Gurah?
4. Bagaimana proses pemantauan penerapan kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan pendidikan plus di SDNU Gurah?
5. Bagaimana proses mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan pendidikan plus di SDNU Gurah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Gurah Kabupaten Kediri dalam mengaplikasikan pendidikan plus.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan peneliti dilakukan penelitian ini yaitu dapat memperluas wawasan peneliti di bidang manajemen pendidikan Islam dan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah. Harapannya peneliti dapat menerapkan

b. Bagi IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah kekayaan pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri.

c. Bagi Lembaga

Harapan peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi lembaga dalam pelaksanaan manajemen pendidikan sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi lembaga tersebut.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wawasan pembaca terkait Manajemen Pendidikan Islam.

e. Para Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga dapat menambah wawasan masyarakat untuk menumbuh-kembangkan sistem pendidikan Islam.

E. Telaah Pustaka

Menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Adapun kajian penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Samrin dengan judul “Dikotomi Ilmu dan Dualisme Pendidikan”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dikotomi ilmu pengetahuan dan dualisme pendidikan erat hubungannya dengan kelahiran sekularisme di Eropa, sepeninggal Ibnu Rusyd melalui aliran *averroisme*. Adanya dikotomi ilmu pengetahuan dan dualisme pendidikan menyebabkan kemunduran bagi umat Islam serta dapat mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Karena landasan filsafat kedua istilah tersebut adalah sekuler. Islam tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan ataupun dualisme pendidikan dalam sistem pendidikan Islam. Dualisme pendidikan merupakan produk kolonial Barat terhadap dunia Islam. Upaya para cendekiawan Islam dalam memusnahkan penyakit dikotomi ilmu pengetahuan dan dualisme pendidikan adalah dengan merekonstruksi nilai falsafah Islam melalui program Islamisasi ilmu pengetahuan serta berusaha untuk mengintegrasikan antara ilmu modern dan ilmu klasik dalam sistem

pendidikan Islam.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Samrin, bertujuan untuk menganalisis tentang problem dikotomi ilmu dan dualisme pendidikan secara umum. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan pendidikan plus berupa di SDNU Gurah Kabupaten Kediri sebagai upaya menghadapi dikotomi keilmuan.

2. Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam, jurnal ini ditulis oleh Rokim. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya secara tindakan berfikir kritis dan praktis untuk

¹³ Samrin, "Dikotomi Ilmu dan Dualisme Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib*, 1 (Januari-Juni, 2013), Vol. 6, 197.

menciptakan dan mengkomunikasikan analisis kebijakan. Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Sedangkan pendekatan normatif bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial terapan juga menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran-pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah kebijakan publik.¹⁴ Tujuan dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan secara global teori William N. Dunn terkait kebijakan publik yang diimplementasikan ke dunia pendidikan Islam. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pendidikan yang dilakukan dalam mengaplikasikan pendidikan plus (keunggulan) di SDNU Gurah yang direkonstruksi oleh peneliti berdasarkan konsep teori yang dikembangkan oleh William N. Dunn tentang kebijakan publik.

¹⁴ Rokim, "Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 2 (Desember, 2019), Vol. 14, 68.

3. *“Implementation of Character Education Policy in MTs Muhammadiyah Al Manar Demak Regency”* yang ditulis oleh Arif Rahman Prasetyo. Dalam jurnal ini dijelaskan dari hasil penelitian Arif Rahman Prasetyo bahwa: Pertama, sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, MTs Muhammadiyah Al Manar secara konsisten telah menerapkan kebijakan pendidikan karakter. Kebijakan program tersebut diantaranya; a) *islamic learning integration*; uniknya dalam metode ini adalah semua materi pembelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai Islam agar dsiswa dapat mengambil petikan hikmah, b) upacara bendera; tujuannya untuk menanamkan semangat nasionalisme, c) ekstrakurikuler; melalui kegiatan unggulan Tapak Suci dan Kepanduan Hizbul Wathan, d) *kencleng filantropi*; yang bekerja sama dengan takmir masjid dan PRM Kenduren melalui iuran rutin untuk keperluan santunan anak yatim dan kaum duafa, menjenguk orang sakit serta bantuan pembangunan RS Muhammadiyah Demak, serta e) pembiasaan kegiatan diniyah positif, seperti; kuliah bakda subuh dan magrib, belajar malam, bermukim di Asrama, muhadharah, dan pesantren Ramadhan yang semua itu dicatat dalam lembar mutaba’ah dan dievaluasi setiap harinya oleh bagian kesiswaan. Kedua, secara keseluruhan, strategi implementasi kebijakan pendidikan karakter di MTs Muhammadiyah Al Manar berjalan dengan sukses, dikarenakan; 1) adanya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa melalui pertemuan rutin saat pergantian semester dan kenaikan kelas, 2) sumber daya pendidik yang militan; dilihat dari kedisiplinan guru yang tinggi,

semangat dalam mengajar serta partisipasi aktif dalam setiap agenda sekolah, 3) adanya sumber dana yang terbilang cukup; pemasukan sekolah berasal dari dana BOS pemerintah, iuran orang tua, dan donatur. Pemasukan tersebut digunakan untuk menggaji guru, melaksanakan program kebijakan, dan melengkapi fasilitas sekolah, 4) adanya alokasi waktu yang maksimal, yakni waktu efektif sekolah dan efektif diniyah, serta 5) adanya garis struktur birokrasi yang jelas melalui pembuatan SOP.¹⁵ Tujuan dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan secara global konsep penerapan pendidikan karakter di MTs Muhammadiyah Al Manar. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pendidikan yang dilakukan dalam mengaplikasikan pembelajaran yang diunggulkan di SDNU Gurah berupa yang direkonstruksi oleh peneliti berdasarkan konsep teori yang dikembangkan oleh Willian N. Dunn tentang kebijakan publik.

¹⁵ Arif Rahman Prasetyo, "Implementation of Character Education Policy in MTs Muhammadiyah Al Manar Demak Regency", *Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1 (Januari, 2020), Vol. 31, 99.